

Research Article

The Role of Regional Government in Providing Psychosocial Services for Women and Children Victims of Violence at the DP3AKB in Indramayu Regency

Cairoh

Universitas Wiralodra Indramayu

E-mail: irohcairoh7@gmail.com

Ilham Setiawan

Universitas Wiralodra Indramayu

E-mail: setiawanilham294@gmail.com

Mulyati Kartini

Universitas Wiralodra Indramayu

E-mail: moelyatikartini@gmail.com

Copyright © 2025 by Authors, Published by Diplomasi: Jurnal Demokrasi, Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Received : August 16, 2025

Revised : September 8, 2025

Accepted : October 10, 2025

Available online : October 31, 2025

How to Cite: Cairoh, Ilham Setiawan, & Mulyati Kartini. (2025). The Role of Regional Government in Providing Psychosocial Services for Women and Children Victims of Violence at the DP3AKB in Indramayu Regency. *Diplomasi : Jurnal Demokrasi, Pemerintahan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(4), 214–222. <https://doi.org/10.58355/dpl.v3i4.64>

Abstract

Violence against women and children in Indramayu regency continues to increase each year and has not been optimally addressed, despite the availability of government services through the DP3AKB. This study aims to evaluate the role of the local government in providing psychosocial services and to identify the challenges faced by DP3AKB Indramayu. Using a descriptive qualitative approach and Soerjono Soekanto's theory, data were collected through interview, observation, and documentation involving informants from DP3AKB plays a significant role in delivering services such as counseling, psychosocial support, legal assistance, and social rehabilitation through the UPTD PPA, in collaboration with various sectors. However. Challenges include low reporting rates, limited budgets, and a shortage of professional staff such as psychologists. Strengthening resources and cross-sector collaboration is essential to optimize service delivery.

Keywords: DP3AKB Indramayu, Psychosocial Services, Violence Against Women and Children, Local Government Role.

Peran Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Layanan Psikososial bagi Perempuan dan Anak korban Kekerasan pada DP3AKB Kabupaten Indramayu

Abstrak

Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Indramayu terus meningkat setiap tahun dan belum tertangani secara optimal meskipun telah tersedia layanan dari pemerintah daerah melalui DP3AKB. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran pemerintah daerah dalam penyediaan layanan psikososial serta kendala yang dihadapi DP3AKB Kabupaten Indramayu. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan teori Soerjono Soekanto, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan dari DP3AKB, Koalisi Perempuan Indonesia, dan korban kekerasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DP3AKB memiliki peran penting dalam penyuluhan, pendampingan psikologis, bantuan hukum, dan rehabilitasi sosial melalui UPTD PPA serta bekerja sama dengan lintas sektor. Namun, terdapat kendala seperti rendahnya pelaporan, keterbatasan anggaran, dan kurangnya tenaga ahli. Diperlukan penguatan sumber daya manusia dan kolaborasi supaya layanan dapat berjalan lebih optimal.

Kata Kunci: DP3AKB Kabupaten Indramayu, Layanan Psikososial, Kekerasan Perempuan dan Anak, Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu permasalahan sosial yang kompleks dan multidimensi. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada aspek fisik korban, tetapi juga menimbulkan luka psikologis dan sosial yang mendalam, serta dapat menghambat proses tumbuh kembang, rasa aman, dan harga diri. Dalam konteks Indonesia, perlindungan terhadap perempuan dan anak telah menjadi prioritas dalam pembangunan nasional, sebagaimana cermin dalam menjaga kebijakan, termasuk undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan rumah tangga, serta undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.

Di Kabupaten Indramayu, permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Data dari dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak (DP3AKB) Kabupaten Indramayu menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat 45 kasus kekerasan terhadap anak, yang didominasi oleh kekerasan seksual. Pada tahun 2024, angka tersebut melonjak menjadi 150 kasus yang mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, hingga eksploitasi dan penelantaran. Tidak hanya itu, kekerasan terhadap perempuan pun meningkat, khususnya dalam ranah domestik seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang mencerminkan masih kuatnya budaya patriarki dan lemahnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak perempuan dan anak.

Peningkatan kasus tersebut menjadi indikator penting akan masih terbatasnya efektivitas sistem perlindungan yang ada. Meskipun pemerintah daerah kabupaten indramayu telah membentuk UPTD perlindungan perempuan dan anak dibawah naungan DP3AKB sebagai Lembaga pelaksana layanan, berbagai kendala

masih dihadapi dalam pelaksanaan layanan psikososial, mulai dari keterbatasan tenaga ahli seperti psikolog, rendahnya anggaran, hingga masih minimnya pelaporan akibat rasa takut dan tekanan sosial yang dialami oleh para korban. Hal ini berdampak pada lambatnya proses penanganan, pendampingan, dan pemulihan korban secara utuh.

Layanan psikososial merupakan bagian dari krusial dalam proses pemulihan korban kekerasan, karena tidak hanya fokus pada aspek hukum, tetapi juga menyentuh sisi emosional dan sosial korban. Pendekatan psikososial juga menekankan pentingnya dukungan lingkungan, keberfungsian lingkungan, dan pemulihan psikologis jangka Panjang. Dengan demikian, kajian ilmiah mengenai peran DP3AKB Kabupaten Indramayu dalam penyediaan layanan psikososial bagi perempuan dan anak korban kekerasan, serta kendala-kendala yang dihadapi, menjadi urgensi yang tidak dapat dilakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan sejauh mana peran pemerintah daerah Kabupaten Indramayu, melalui DP3AKB, dalam penyediaan layanan psikososial bagi perempuan dan anak korban kekerasan serta menganalisis hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana peran pemerintah daerah Kabupaten Indramayu, khususnya melalui dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak (DP3AKB), dalam penyediaan layanan psikososial bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggali fenomena sosial yang kompleks dan sarat makna, yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, namun perlu ditelusuri melalui pemahaman terhadap proses, peran, serta tantangan yang dihadapi oleh pelaku utama dalam pelaksanaan program di lapangan (Moleong, 2019). Penelitian dilakukan dalam konteks alamiah, di mana peneliti bertindak sebagai instrument utama dalam pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sugiyono, 2019)

Data dikumpulkan melalui observasi langsung dilingkungan DP3AKB, wawancara mendalam dengan key informan, serta dokumentasi, laporan kegiatan, dan regulasi terkait. Analisis data dilakukan secara induktif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2019). Keabsahan data dijaga dengan menerapkan kriteria *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability* (Moleong, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DISDUK-P3A) Kabupaten Indramayu merupakan hasil penggabungan kembali dua dinas terpisah, yaitu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sesuai Perda No. 8 Tahun 2021 dan Perbup No. 3 Tahun 2022. Sebelumnya, dua dinas tersebut berasal dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB), yang kemudian dipisahkan melalui Perda No. 9 Tahun 2016. Penggabungan ini bertujuan memperkuat koordinasi dan efektivitas pelayanan terhadap pengendalian penduduk, ketahanan keluarga, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

DISDUK-P3A memiliki peran strategis sebagai pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Struktur organisasinya terdiri dari kepala dinas, sekretariat, enam bidang utama yang membawahi beberapa kelompok substansi, UPTD, serta kelompok jabatan fungsional. Setiap bidang menangani aspek berbeda sesuai tupoksinya, seperti ketahanan keluarga, kesehatan reproduksi, pengarusutamaan gender, dan pemenuhan hak anak.

Visi DISDUK-P3A adalah mewujudkan keluarga berkualitas, perempuan berdaya, dan anak terlindungi dalam rangka mendukung terwujudnya Indramayu yang bersih, religius, maju, adil, makmur, dan hebat. Misi yang diusung antara lain menyelenggarakan program KB, melindungi perempuan dan anak dari kekerasan, serta meningkatkan hak-hak anak, termasuk bagi anak dalam kondisi khusus. Seluruh kegiatan diarahkan pada penguatan kelembagaan, advokasi, serta pengembangan jejaring perlindungan yang komprehensif dan berbasis HAM.

Salah satu fokus utama penelitian ini adalah Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, yang secara langsung menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bidang ini bertanggung jawab atas perumusan kebijakan, penyediaan layanan pengaduan dan rujukan, koordinasi data kekerasan, hingga advokasi serta penguatan jejaring layanan. Tugas dan fungsi tersebut dijalankan melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah daerah, lembaga layanan, serta masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan responsif terhadap isu kekerasan berbasis gender.

Peran Pemerintahan Daerah Dalam Penyediaan Layanan Psikososial Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Pada DP3AKB Kabupaten Indramayu

Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan

The Role of Regional Government in Providing Psychosocial Services for Women and Children Victims of Violence at the DP3AKB in Indramayu Regency

Cairoh, Ilham Setiawan, Mulyati Kartini

Anak (DP3AKB), memainkan peran strategis dalam penyediaan layanan psikososial bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Peran ini tidak hanya dimaknai secara administratif, melainkan sebagai manifestasi tanggung jawab etis dan sosial terhadap perlindungan kelompok rentan. Dengan berlandaskan norma-norma sosial seperti kepedulian, empati, dan keadilan, DP3AKB menjalankan mandatnya melalui berbagai layanan terpadu seperti konseling psikologis, pendampingan hukum, dan mediasi keluarga, yang seluruhnya difasilitasi secara gratis melalui dukungan APBD dan regulasi daerah yang relevan.

Dalam pelaksanaannya, layanan psikososial diorganisasi dengan pendekatan kolaboratif dan berkelanjutan. DP3AKB tidak bekerja sendiri, tetapi menjalin kemitraan dengan berbagai aktor seperti Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), lembaga bantuan hukum, dinas kesehatan, serta aparat penegak hukum. Kemitraan ini tidak hanya memperluas jangkauan layanan, tetapi juga memperkuat kualitas pendampingan terhadap korban. Proses koordinasi dilakukan secara terbuka, responsif, dan etis, menciptakan pola kerja yang sinergis serta mempercepat penanganan kasus di lapangan dengan tetap menjaga prinsip kerahasiaan dan perlindungan terhadap korban.

Aspek penting lain dalam penyediaan layanan adalah penghargaan terhadap konteks budaya dan nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat Indramayu. DP3AKB menyadari bahwa isu kekerasan terhadap perempuan dan anak seringkali dibungkam oleh norma sosial yang memosisikannya sebagai urusan privat. Oleh karena itu, pendekatan layanan dilakukan secara adaptif dan tidak konfrontatif, dengan menggandeng tokoh masyarakat serta fasilitator lokal sebagai jembatan komunikasi. Strategi ini terbukti efektif dalam menciptakan ruang aman bagi korban untuk bersuara, serta membangun kepercayaan antara lembaga layanan dan masyarakat.

Peran individu dalam organisasi pun menjadi penentu utama efektivitas layanan. Pegawai DP3AKB tidak hanya berperan sebagai pelaksana tugas, melainkan juga sebagai representasi dari nilai-nilai kemanusiaan dalam struktur birokrasi. Komitmen personal yang tinggi, kemampuan bekerja lintas sektor, serta kesediaan untuk mendampingi korban di luar jam kerja menunjukkan bahwa pelayanan publik yang humanis sangat bergantung pada integritas sumber daya manusianya. Di sisi lain, masyarakat sebagai penerima manfaat juga bertransformasi menjadi aktor aktif dalam proses pemulihan, melalui keterlibatan dalam forum diskusi, advokasi kebijakan, dan berbagi pengalaman yang memperkaya penyusunan program perlindungan.

Dengan demikian, peran Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu dalam penyediaan layanan psikososial telah menunjukkan model pelayanan publik yang tidak hanya birokratis, tetapi juga berbasis nilai, budaya, dan kolaborasi sosial. Sistem layanan yang dibangun oleh DP3AKB terbukti mampu merespons

kompleksitas persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan cara yang holistik, sensitif, dan tepat sasaran. Sinergi antara aktor negara, masyarakat sipil, dan komunitas menjadi kekuatan utama dalam menciptakan layanan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada pemulihan menyeluruh bagi korban.

Faktor Penghambat Penyediaan Layanan Psikososial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan DP3AKB Kabupaten Indramayu

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyediaan layanan psikososial bagi perempuan dan anak korban kekerasan oleh DP3AKB Kabupaten Indramayu masih menghadapi sejumlah hambatan, baik dari faktor internal maupun eksternal. Secara internal, kendala utama terletak pada keterbatasan sumber daya manusia (SDM) profesional seperti psikolog dan konselor, anggaran operasional yang terbatas, lemahnya koordinasi antar bidang dalam dinas, serta belum optimalnya sistem pelaporan dan pendataan kasus. Keterbatasan ini menyebabkan proses pendampingan dan penanganan kasus berjalan kurang maksimal.

Sementara dari faktor eksternal, tantangan terbesar adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap isu kekerasan, kuatnya stigma terhadap korban, serta budaya lokal yang menganggap kekerasan rumah tangga sebagai urusan pribadi. Hal ini membuat korban enggan melapor atau mencari bantuan. Selain itu, kurangnya dukungan dari tokoh masyarakat, aparat desa, dan minimnya kolaborasi lintas sektor di tingkat lokal turut menyulitkan upaya penjangkauan ke wilayah pedesaan. Untuk itu, penguatan SDM, peningkatan anggaran, optimalisasi sistem informasi, serta pendekatan kultural dan partisipatif menjadi langkah penting dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Faktor Pendukung Penyediaan Layanan Psikososial Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Pada DP3AKB Kabupaten Indramayu

Adanya komitmen kuat dari pemerintah daerah yang mewujudkan melalui dukungan anggaran dari APBD, tersedianya tenaga profesional seperti psikolog dan pendamping sosial, serta terbentuknya jaringan lintas sektor dengan dinas terkait, aparat penegak hukum, dan organisasi masyarakat seperti Koalisi Perempuan Indonesia (KPI). Selain itu juga, koordinasi internal baik di dalam Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak (DP3AKB) serta keterlibatan masyarakat dan tokoh lokal dalam pendekatan berbasis budaya turut memperkuat layanan yang diberikan.

Upaya Dalam Mengatasi Faktor Penghambat Penyediaan Layanan Psikososial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Pada DPAKB Kabupaten Indramayu.

Dalam mengatasi hambatan penyediaan layanan psikososial bagi

The Role of Regional Government in Providing Psychosocial Services for Women and Children Victims of Violence at the DP3AKB in Indramayu Regency

Cairoh, Ilham Setiawan, Mulyati Kartini

perempuan dan anak korban kekerasan, DP3AKB Kabupaten Indramayu menempuh sejumlah strategi yang terarah dan berkelanjutan. Upaya tersebut mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan agar petugas mampu memberikan layanan secara profesional dan empatik. Selain itu, DP3AKB memperkuat kemitraan lintas sektor dengan menggandeng psikolog, aparat penegak hukum, LSM, serta komunitas lokal guna menciptakan sistem layanan yang terpadu dan komprehensif. Pendekatan berbasis budaya lokal juga diutamakan dengan melibatkan tokoh masyarakat untuk membangun rasa aman dan kepercayaan korban. Tak kalah penting, DP3AKB secara rutin melakukan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat serta membentuk ekosistem sosial yang lebih peduli dan responsif terhadap isu kekerasan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa DP3AKB Kabupaten Indramayu memiliki peran strategis dalam penyediaan layanan psikososial bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Layanan seperti konseling psikologis, pendampingan hukum, dan mediasi keluarga disediakan secara gratis melalui anggaran APBD. Pelayanan ini diperkuat melalui kerja sama dengan psikolog, aparat penegak hukum, LSM, serta organisasi masyarakat seperti Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), guna memastikan jangkauan yang merata hingga ke tingkat desa. Petugas DP3AKB menjalankan peran secara profesional dan kolaboratif, menjadikan layanan lebih responsif dan manusiawi.

Namun, pelaksanaan layanan masih menghadapi hambatan, seperti keterbatasan SDM, anggaran yang minim, koordinasi internal yang belum optimal, serta rendahnya kesadaran masyarakat dan stigma terhadap korban. Untuk mengatasi hal tersebut, DP3AKB melakukan peningkatan kapasitas petugas, memperluas kemitraan lintas sektor, menyelaraskan pendekatan dengan nilai budaya lokal, mengoptimalkan pelaporan digital, serta rutin melakukan sosialisasi dan edukasi. Pelibatan komunitas dan relawan juga menjadi strategi penting dalam memperkuat layanan berbasis masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Erikson, E. (2010). *Childhood And Society*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hidayat, A. A. (2021). *Menyusun Instrumen Penelitian & Uji Validitas-Reliabilitas*. Health Books Publishing. Hal. 12.
- Moleong, Lexy J. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Soerjono, Soekanto. 2006. *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.

The Role of Regional Government in Providing Psychosocial Services for Women and Children Victims of Violence at the DP3AKB in Indramayu Regency

Cairoh, Ilham Setiawan, Mulyati Kartini

- Sugiyono. 2019. *Merote Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2023. *Metode Penelitian Studi Kasus: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi*. Bandung: Alfabeta
- Walgito, Bimo 2003. *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hidayat, A. (2020). *Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan*. *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling*, 5(2), 57. <https://doi.org/10.23916/08702011>
- mince, yare. (2021). *Peran Ganda Perempuan Pedagang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor*. 3(2), 17–28.
- Pasalbessy, J. D. (2010). *Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Serta Solusinya*. *Sasi*, 16(3), 8. <https://doi.org/10.47268/sasi.v16i3.781>
- Putri, L. R., Pembayun, N. I. P., & Qolbiah, C. W. (2024). *Dampak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan: Sebuah Sistematis Review*. *Jurnal Psikologi*, 1(4), 17. <https://doi.org/10.47134/pjp.v1i4.2599>
- Sodah, Y. (2023). *Kekerasan Terhadap Perempuan: Pencegahan dan Penanganan Suatu Tinjauan Psikologi Sosial*. *Syntax Idea*, 5(11), 2327–2336. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i11.2912>
- Sondak, S. H. (2019). *Faktor-Faktor Loyalitas Pegawai Di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara*. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(1), 671–680.
- Susilowati, E., & Ratnaningrum, S. (2023). *PELAYANAN BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (Studi Di DKI Jakarta)*. *Pekerjaan Sosial*, 22(2), 148–163. <https://doi.org/10.31595/peksos.v22i2.1110>
- Yanti, P. E., & Agustina, L. F. (2022). *Gambaran Psikososial Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*. *Ash-Shudur: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, 2(1), 43–57.
- ulia Rahmi, & Ansar, M. U. K. (2023). *Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sorong*. *Muadalah: Jurnal Hukum*, 3(1), 74–88.
- Dewi, N. K. C. P., & Remaja, I. N. G. (2020). *Efektivitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Buleleng dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak*. *Kertha Widya: Jurnal Hukum*, 8(1), 156–163.
- Hidayat, A. (2021). *Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan*. *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman*, 8(1), 22–33.
- Elena, V., Fuadi, M. A. M., Sunarya, Y. A., Yudistira, M. H. T., & Arrafi, D. N. (2024). *Peran DP2KBP3A dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan*

The Role of Regional Government in Providing Psychosocial Services for Women and Children Victims of Violence at the DP3AKB in Indramayu Regency

Cairoh, Ilham Setiawan, Mulyati Kartini

Kekerasan terhadap Anak di Kabupaten Subang. Wacana Publik: Jurnal Administrasi Publik, 6(2), 103–115.